BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perang dunia telah menjadikan ilmu hubungan internasional semakin berkembang dan dipelajari. Pada mulanya fokus hubungan internasional hanya mengarah pada konflik dan perang antarnegara serta usaha perdamaian pada saat perang dunia. Seiring dengan berjalannya waktu ilmu hubungan internasional juga berkaitan dengan hal lain selain perang dan perdamaian itu sendiri. Hal-hal yang melingkupi ilmu hubungan internasional juga meliputi ekonomi, kerjasama internasional, isu lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ketergantungan antarnegara akan hasil alam, hasil bumi, serta sumber daya yang lain, menjadikan negara-negara saling bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya, muncullah badan-badan kerjasama internasional atau pun perusahaan internasional yang saling bekerja sama dalam bidang ekonomi. Tidak hanya itu, isu tentang lingkungan di bumi pun menjadi fokus negara-negara, saling bekerjasama untuk memperkecil dampak pemanasan global adalah salah satu contoh isu bersama antar negara-negara di dunia.

Fenomena hubungan internasional dapat dilihat dengan dua cara yang berbeda. Pertama dipandang sebagai fenomena sosial dan kedua dipandang sebagai salah satu disiplin ilmu. Sebagai fenomena sosial, aspek cakupan hubungan internasional ini sangat luas, yakni segala aktivitas kehidupan manusia yang kompleks dan bersifat internasional. Sebuah hubungan internasional dapat terjalin

karena adanya perbedaan kepentingan, ketidakmerataan kekayaan alam, perbedaan letak geografis, dan lain lain. Sehingga menuntut sebuah negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dalam negerinya, baik berupa hubungan di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan (hankam), atau hubungan-hubungan lainnya.

Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak melakukan kerjasama internasional dalam berbagai bidang dengan negara lain , kerjasama internasional sebagai suatu bentuk hubungan diplomatis antara Indonesia dan negara – negara lain diberbagai bidang penting untuk menyokong kepentingan rakyat. Selain itu, kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini dapat mempererat hubungan kedua negara. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah di rancang oleh

Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *nonself governing territory* (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Bilateral&l=id diakses pada tanggal 7 Mei 2017).

Bantuan luar negeri merupakan salah satu fenomena umum politik internasional yang terjadi sejak Perang Dunia II. Dalam cakupannya bantuan luar negeri diberikan berdasarkan atas dua tujuan, yaitu untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan pengurangan angka kemiskinan di negara – negara berkembang dan untuk mencapai kepentingan politik serta strategis negara donor. Ada kepentingan lain dari negara pendonor yaitu mendapatkan manfaat ekonomi dan politik pada saat ekonomi negara penerima sedang berkembang karena akan memiliki hubungan perdagangan maupun investasi yang menguntungkan dan pengaruh politik atas negara penerima bantuan.

Bantuan asing (luar negeri) yang dimaksud adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Hampir semua bantuan melalui pemerintah mempunyai syarat – syarat yang longgar atau lunak yakni diberikan sebagai hibah semata – mata (*grants*) atau sebagai pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang lebih lama daripada yang ditawarkan kepada pasar modal swasta internasional (Lincolin Arsyad : 166). Selain itu, pemerintah juga memberikan pinjaman – pinjaman komersial, termasuk kredit ekspor, investasi modal (*equity*), dan pinjaman – pinjaman "keras" dari Bank Dunia dan bank – bank pembangunan regional.

Aliran – aliran konsesional tersebut secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi atau *Official Development Assistance* (ODA), tetapi lebih dikenal sebagai bantuan luar negeri. Bantuan ini dapat dibagi lagi atas bantuan bilateral, yang diberikan langsung oleh sebuah negara kepada negara yang lainnya dan bantuan multilateral, dimana dana – dana mengalir ke sebuah perwakilan internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan bank – bank pembangunan regional, yang selanjutnya meminjamkan atau menyalurkan dana – dana tersebut ke Negara Sedang Berkembang penerima. Akhirnya, bantuan luar negeri tersebut dapat terbentuk bantuan teknis, pemberian tenaga – tenaga terampil/ahli; atau bantuan modal, pemberian dana atau komoditi – komoditi untuk berbagai tujuan. (https://www.scribd.com/doc/94790286/Sumber-Dana-Dari-Luar-Negeri diakses pada tanggal 10 Oktober 2017)

Negara – negara yang utang luar negerinya besar pada umumnya menghadapi masalah yang tidak hanya berhenti setelah mendapatkan utang tersebut tetapi yang paling adalah bagaimana negara tersebut dapat membayar kembali utang tersebut. Masalah yang seperti ini banyak terjadi di negara – negara terutama di negara berkembang atau Negara Dunia Ketiga. Bahkan pembayaran kembali utang tersebut merupakan masalah yang sangat pelik bagi beberapa negara. Pasalnya, pembayaran kembali utang harus tetap bisa menjamin stabilitas yang juga harus mampu mempertahankan kegiatan ekonominya.

Bantuan luar negeri juga dapat dianggap dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan, karena bantuan luar negeri dapat secara seketika meningkatkan persediaan tabungan domestik sebagai hasil dari

meningkatnya laju pertumbuhan yang ingin dicapai. Tapi dalam kenyataannya, banyak bantuan luar negeri tersebut yang tidak diinvestasikan, produktifitas dari investasi tersebut sering kali sangat rendah.

Ekonomi indonesia di bangun dari cerita sejarah ekonomi yang panjang, dari mulai masa pemerintahan orde lama di mana negara Indonesia masih baru mulai melangkah menata kehidupan dan ekonomi sampai di masa orde baru dan era reformasi. Di masa orde lama perekonomian sangat sulit karena Indonesia baru merdeka dan mencoba menata iklim ekonomi yang masih belum memiliki keteraturan yang baku. Tokoh ekonomi indonesia kala itu yakni Bung Hatta menekankan perekonomian kepada suatu hal yang harus bisa mensejahterakan sesama. Konsep perekonomian beliau dahulu adalah koperasi yang memiliki falsafah gotong royong dan kebersamaan.

Pada masa Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia haruslah dilakukan oleh Indonesia sendiri. Bahkan Soekarno melakukan kampanye Ganyang Malaysia yang semakin memperkuat posisinya sebagai oposisi bantuan asing. Semangat nasionalisme Soekarno menjadi pemicu sikapnya yang tidak menginginkan pihak asing ikut campur dalam pembangungan ekonomi Indonesia. Padahal saat itu di awal kemerdekaannya Indonesia membutuhkan pondasi yang kuat dalam pilar ekonomi. Sikap Soekarno yang anti bantuan asing pada akhirnya membawa konsekuensi tersendiri yaitu terjadinya kekacauan ekonomi di Indonesia. Soekarno cenderung mengabaikan permasalahan mengenai ekonomi negara, pengeluaran besar-besaran

yang terjadi bukan ditujukan terhadap pembangunan, melainkan untuk kebutuhan militer, proyek mercusuar, dan dana-dana politik lainnya. Soekarno juga cenderung menutup Indonesia terhadap dunia luar terutama negara-negara barat. Hal itu diperkeruh dengan terjadinya inflasi hingga 635,5% per tahun pada 1966 yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan ekonomi bagi Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada era Orde Lama kemudian menurun karena rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

Melihat kepada sejarah, pada tahun 1966 Indonesia mengalami hiperinflasi mencapai 635,5% karena defisit anggaran belanja hingga harus melakukan pemotongan nilai rupiah dari Rp1000 menjadi Rp 1. Saat itu pada masa ekonomi terpimpin, pemerintah lebih cenderung mengutamakan kepentingan politik. Banyaknya pendanaan untuk proyek negara menyebabkan pengeluaran negara membengkak. Padahal tidak semua pendanaan termasuk pengeluaran produktif misalnya konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Karena keluar dari keanggotaan PBB dan IMF, hutang luar negeri Indonesia kepada IMF bertambah dan pemerintah Indonesia beralih mengambil pinjaman dari Cina dan negara blok timur pada saat itu (https://jurnalkampus.news/2014/03/sejarah-inflasi-indonesia-diakses pada tanggal 10 Oktober 2017)

Pada masa pemerintahan Orde Baru Pendanaan dari luar negeri memegang peran penting dalam menangani inflasi. Meskipun pendanaan dari luar negeri tersebut selama bertahun-tahun diberi label sebagai pelengkap pendanaan pembangunan, namun setidak-tidaknya dalam 30 tahun, selama Repelita I sampai Repelita VI, jumlah pendanaan dari luar negeri tidak menurun besarannya.

Kecenderungan ini mengarah pada situasi bahwa Indonesia menjadi tergantung pada pendanaan dari luar negeri.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie semangat demokratisasi pun digalakkan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap pemerintahannya. Namun, rakyat Indonesia pada masa itu hanya melihat era pemerintahan Habibie sebagai era transisioal pemerintahan Orde Baru dengan era reformasi yang dianggap masih membawa kegagalan Orde Baru. Di sisi lain, Habibie menghadapi sisa masalah Orde Baru yang meninggalkan krisis moneter di Indonesia. Fokus politik luar negeri Indonesia kemudian ditata untuk membangun kembali ekonomi Indonesia dan memperbaiki stabilitas keamanan di Indonesia. Instrumen yang digunakan Habibie untuk dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia dalam masa transisi antara lain pengelolaan investasi swasta, diplomasi terhadap bantuan asing, perdagangan bebas, kekuatan militer dan sistem politik yang demokratis (Widhiasih, 2013).

Dinamika domestik yang dihadapi Presiden Abdurrahman Wahid merupakan kelanjutan dari era Habibie. Fokus demokratisasi Indonesia dan pemulihan ekonomi masih diutamakan. Reposisi angkatan militer untuk kembali kepada tugasnya sendiri menjadi kunci penting untuk merealisasikan demokrasi di Indonesia. Dalam tatanan internasional, penggalangan dukungan internasional untuk mengembalikan kredibilitas Indonesia juga terus dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Hal itu ditunjukkan dengan intensitas kunjungan luar negeri Gus Dur yang tinggi selama dua puluh bulan ia menjabat, yang juga dianggap sebagai aksi pemborosan, walaupun langkah tersebut dilakukan untuk membuka

pintu investasi asing di Indonesia. Diplomasi yang demikian disebut sebagai ‘diplomasi persatuan’ yang juga ditujukan untuk mendapatkan dukungan internasional terhadap permasalahan disintegrasi bangsa yang dihadapi Indonesia yang menjadi isu yang diprioritaskan, hal itu berdasarkan gerakan separatisme yang muncul di Aceh, Papua, dan lain-lain yang membuahkan hasil dukungan dari Australia dan Selandia Baru. Namun, kunjungan luar negeri Gus Dur ke setidaknya 80 negara tidak diikuti dengan kebijakan yang komprehensif untuk memajukan Indonesia. Di sisi lain, Gus Dur kurang memperlihatkan sensitivitas domestik, hal ini diperlihatkannya dengan mengambil kebijakan yang dinilai kontroversial seperti idenya untuk membuka hubungan kerjasama perdagangan dengan Israel yang kemudian dibatalkan karena menuai kecaman dalam negeri.

Pada dasarnya, tujuan politik luar negeri Indonesia pada era Gus Dur masih terfokus pada usaha stabilitas ekonomi dan keamanan melalui diplomasi yang direalisasikan melalui investasi swasta, diplomasi bantuan luar negeri, perdagangan bebas, otonomi regional, dan sistem politik demokratis. Keberhasilan Gus Dur di era pemerintahannya yang singkat ditunjukkan dengan meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata internasional yang diperlihatkan dengan mengalirnya bantuan internasional untuk membantu perekonomian dalam negeri (Widhiasih, 2013).

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis.

Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri.

Secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khususnya IMF dan bank dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui *Stuctrual Adjustment Program* (SAP) (Widhiasih, 2013).

Strategi politik luar negeri Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi mendayung diantara dua karang seperti yang di tunjukan pada masa Megawati, namun mengarungi samudera yang luas serta peran parlemen yang mendominasi dibandingkan peran Departemen Luar Negeri. Hal ini diperlihatkan SBY dengan semboyannya *All Direction Foreign Policy*, yang memungkinkan Indonesia untuk bebas memilih berbagai pihak, dan semboyan *A Million Friends Zero Enemy* yang dimaksudkan untuk merangkul kawan dan meminimalisir adanya musuh dengan soft power. Kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai Indonesia juga masih seputar pengelolaan integritas nasional, stabilitas ekonomi, pengelolaan ancaman terorisme, dan pencitraan Indonesia di mata internasional dengan secara aktif melibatkan diri pada forum-forum internasional, seperti pada APEC, ASEAN, dan lain-lain.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula (https://patmikumalasari.wordpress.com/2014/01/11/masa-pemerintahan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono/ diakses pada tanggal 14 Februari 2018)

Terpilihya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia pada pilpres 2014 silam, menjadikan kinerja pemerintahan di era pimpinan presiden Jokowi ini menjadi sorotan publik. Kinerja pemerintah saat ini menjadi lebih transparant dan dengan itu menjadikan rasa acuh masyarakat terhadap pemerintahan di indonesia makin kesini makin berkurang. Bahkan sekarang pelajar yang duduk di bangku menengah yang awalnya tidak mengerti tentang pemerintahan dan kasus perekonomian kini menjadi antusias sekali terhadap perkembangannya. Dengan bantuan media sosial pun kinerja pemerintahan era Jokowi pun menjadi lebih mudah di ketahui oleh masyarakat awam.

Presiden Jokowi terus berusaha agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat. Dengan itu, beliau kini sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang dikatakan mampu membuat perekonomian Indonesia membaik diantaranya : 1) Insentif untuk semua pemangku kepentingan 2) Fokus mengundang Investor asing 3) Penguatan daya saing dunia usaha 4) Formula baru perhitungan upah minimum dan kredit modal kerja untuk produsen barang ekspor 5) Insentif untuk revaluasi aset dan penghapusan pajak berganda dalam *Real Estate Investment Trust* (REIT) 6) Insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), 7) Menjadikan Rupiah Bergerak Positif. Kebijakan kebijakan diatas merupakan langkah strategis

presiden Joko Widodo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana menarik minat investor asing menjadi poin utama dalam mengatasi pembangunan nasional agar laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkembang dengan pesat.

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004 mengamanatkan agar pinjaman luar negeri harus secara bertahap dikurangi sebagaimana tertuang pada Bab IV Arah Kebijakan butir B (angka 7, 9, dan 23). Amanat ini sesunguhnya telah digariskan pula dalam GBHN pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, dan 1999. Semuanya menyebutkan bahwa bantuan luar negeri hanyalah pelengkap pendanaan pembangunan. Besaran dan peranan bantuan luar negeri harus dikurangi dan diperkecil. Bahkan sebelum itu, Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa kredit luar negeri dan modal asing dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan ekonomi, namun harus ada teladan untuk membebaskan diri dari ketergantungan dari luar negeri.

Di sisi lain, Ketetapan MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, merekomendasikan agar dilakukan evaluasi kebijakan, sehingga negara kita tidak makin terjebak dalam ketergatungan kepada negara donor. Hal ini tertera pada Bab III Rekomendasi Kebijakan butir 4.c. Di samping itu, melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002, MPR merekomendasikan kepada presiden dan pemerintah agar tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan IMF yang berakhir pada akhir tahun 2003. Kemudian pemerintah diminta mempersiapkan rencana mengakhiri

kerjasama itu (*exit plan*) sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan kegoncangan moneter (Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral ceppie@bappenas.go.id diakses pada tanggal 12 Februari 2018)

Dilihat dari persyaratannya, selama ini pendanaan luar negeri yang diterima pemerintah Indonesia berupa: hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, pinjaman campuran (pinjaman bersyarat lunak dan fasilitas kredit ekspor), dan pinjaman komersial. Sedangkan menurut bentuk dan peruntukannya, dapat dikelompokkan menjadi hibah/pinjaman program dan hibah/pinjaman proyek. Berbagai jenis dan skema pendanaan tersebut diselenggarakan untuk menutup defisit pembiayaan pembangunan dan pembiayaan rutin.

Negara-negara penghasil minyak seperti Kuwait dan Libya menjadi pemain penting dalam pemberian bantuan luar negeri. Alokasi dana bantuan sudah mulai bergeser dari yang semula cenderung *politic oriented* ke *arah development oriented* yang fokus memberikan sumbangsih bagi pengembangan negara penerima dana. Kebijakan bantuan pembangunan sendiri lebih kompleks dan rumit sehingga profesionalisasi dari lembaga perwakilan donor layak diupayakan. Pengucuran dana diberikan kepada perwakilan multilateral lembaga pelaksana bantuan yang lebih banyak tertuju pada usaha pembangunan.

Ada beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya dinamika *foreign aid* pada masa ini. Satu diantaranya ialah penurunan suhu persaingan blok Barat dan Timur. Saat itu, mayoritas perang besar telah usai. Tempo ketegangan akibat rivalitas sengit sekutu AS dan US beserta aliansinya sudah mulai reda. Ketakutan terjadinya perang besar yang jamak di era 1960 telah sirna sehingga

alokasi dana bantuan yang tadinya bermotifkan diplomatik dan politik bergeser ke arah pembangunan. Krisis minyak, dan pangan akibat kelaparan juga memberikan pengaruh signifikan pada pemberian bantuan. Krisis pangan yang terjadi pada medio 1970-an dan 1980-an mendapatkan perhatian besar dunia sehingga bantuan dana yang mengalir melonjak tajam. Sementara krisis minyak akibat perang Arab-Israel dan perang teluk mengatrol harga minyak cukup tinggi. Akibatnya, negara donor kelimpungan, dana bantuan yang mengalir pun turun.

Peran serta negara Kuwait sejak Amir Kuwait Shaikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah memangku tahta keamiran tahun 2006 di antaranya dapat dilihat dari penyelenggaraan Konferensi Pertama Negara-negara Donor untuk membantu situasi kemanusiaan di Suriah tahun 2013, ketika itu Amir Kuwait mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar 300 juta dollar AS.

Kemudian diikuti oleh Konferensi Kedua Negara-Negara Donor untuk Membantu Situasi Kemanusiaan di Suriah tahun 2014, ketika itu Amir Kuwait memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 500 juta dollar AS dan juga penyelenggaraan Konferensi ketiga tahun 2015 dengan bantuan kemanusiaan sebesar 350 juta dollar AS untuk Suriah.

Negara Kuwait, sejak kenaikan tahta Yang Mulia Amir Negara Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, pada tahun 2006, telah mencatat pertumbuhan signifikan dalam memberi dan memperluas bantuan kemanusiaan, secara signifikan, ke berbagai belahan dunia. Dan tidaklah datang dari kekosongan atau basa basi belaka, dimana Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa terdahulu, Ban Ki-moon, telah memutuskan bahwa Negara Kuwait menjadi "Pusat

Kemanusiaan Internasional", dan Yang Mulia Amir Negara Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, telah dianugerahkan julukan sebagai "Pemimpin Kemanusiaan". Hal itu adalah penekanan bangsa-bangsa atas peran kemanusiaan yang positif dan pelopor Negara Kuwait di seluruh dunia (Handbook National Day KBRI Kuwait,2015:2)

Sesuai dengan statistik Kedutaan Besar Negara Kuwait di Jakarta, bahwa Republik Indonesia beruntung memperoleh dari bantuan-bantuan kemanusiaan tersebut, yang diperkirakan mencapai U$ 164.179.342 juta sejak 30 Juni 2004 hingga 30 Juni 2017, yang mencakup seluruh provinsi Indonesia, di antaranya pembangunan masjid, panti asuhan, pusat-pusat pelatihan, rumah sakit, klinik, pusat bacaan Al Qur'an, sumur air bersih, pusat pelatihan keterampilan, perumahan untuk orang-orang yang terkena dampak bencana alam dan kaum miskin, bantuan darurat, lembaga pelatihan guru, bengkel jahit, perpustakaan, pencetakan Alquran, santunan anak yatim, buka puasa bersama, hewan kurban, sponsor pendidikan studi mahasiswa Indonesia di luar negeri, proyek pengembangan, perikanan, stasiun radio kecil, dan santunan guru. Dan kami ingin menunjuk pada beberapa desa yang memakai nama para Amir Negara Kuwait, seperti desa Al Maghfur Lahu Shaikh Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah di Banda Aceh, Provinsi Aceh untuk para korban tsunami pada tahun 2004, dan desa Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah di Garut, Jawa Barat, yang merupakan salah satu contoh pemberian amal sosial dan kemanusiaan Kuwait yang tak henti-hentinya (Handbook National Day KBRI Kuwait,2015: 3)

Dalam bidang amal sosial dan kemanusiaan, muncul banyak lembaga dan organisasi swasta Kuwait yang berperan dalam melindungi proyek-proyek amal sosial dan kemanusiaan tersebut di antaranya Organisasi Amal Sosial Islam Internasional (*Islamic International Charitable Organization*), Jamiyah Ihya Al Turath Al Islami, Jamiyah Sheikh Abdullah Al-Nouri Al Khairiyah, Jamiyah Al Islah Al Ijtimai, Bait Zakat Kuwait, dan Bulan Sabit Merah Kuwait bekerjasama dengan organisasi dan lembaga Islam di Indonesia seperti Jamiyah Al Rahmah, Al Jamiyah Al Indonesiyah Al Kuwaitiyah Al Khairiyah Al Musytarakah, Jamiyah Bait Al Khairiyah, Jamiyah Al Ishlah Bina Ummat, dan Al Lajnah Al Khairiah Al Musytarakah untuk Bantuan Kemanusiaan (Handbook National Day KBRI Kuwait ,2015: 3)

Pondok Pesantren Darussalam Garut merupakan suatu lembaga pendidikan yang berjiwa pesantren dengan system 24 jam full dimana seluruh elemen yang ada wajib untuk hidup di lingkungan pesantren dari mulai Pimpinan/Kyai, Ustadz/ Ustadzah dan seluruh santri / santriah .

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Garut didirikan setelah kembalinya KH. Ahmad Ghozali Mu’thie, S.Ag dari Pondok Modern Darussalam Gontor pada tanggal 12 Shafar 1392 H, bertepatan dengan tanggal 28 Mei 1972 M. Pada awal perintisan pondok pesantren beliau mendirikan Madrasah Diniyah Ula,Wustha dan Akhir, selain mendirikan madrasah tersebut beliau membina masyarakat dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama islam dalam bentuk Majlis Taklim, kemudian pada tahun 1979 adik beliau KH. Asep

Sholahuddin Mu'thie kembali dari Gontor ikut membantu KH. Ahmad Ghozali Mu'thie, S.Ag dalam mengurus madrasah dan membina masyarakat.

Pada tahun 1986 tepatnya tanggal 9 Desember 1986 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'utsani 1407 H dan kembalinya KH. Cecep Ishaq Asy'ari Mu'thy dari Gontor didirikanlah Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (TMI) Pondok Pesantren Darussalam Garut. Berkumpulnya kembali Tiga Serangkai yaitu KH. Ahmad Ghozali Mu'thie, S.Ag , KH. Asep Sholahuddin Mu'thie , dan KH. Cecep Ishaq Asy'ari Mu'thy maka secara resmi Pondok Pesantren Darussalam Garut berdiri (Handbook Profil Pondok Pesantren Darussalam,2017: 2)

Pada Tahun 1986 terjadi Pertemuan antara perwakilan Pondok Pesantren Darussalam Garut yang diwakili oleh KH. Asep Sholahuddin Mu'thie dengan Ust. Abdullah Baharmuz di Mulhaq Bini Kedutaan Saudi Arabia. Pertemuan ini membahas keinginan Pondok Pesantren Darussalam Garut untuk menjalin kerjasama dengan para donatur di Timur Tengah, akhirnya terjadilah kesepakatan antara Pondok Pesantren Darussalam Garut dengan Ust. Abdullah Baharmuz yang memiliki akses dengan para donatur di Timur Tengah . Para pendiri pondok yaitu KH. Ahmad Ghozali Mu'thie, S.Ag , KH. Asep Sholahuddin Mu'thie , dan KH. Cecep Ishaq Asy'ari Mu'thy fokus mengelola dan membina Pondok Pesantren sedangkan Ust. Abdullah Baharmuz membantu mencari donatur dari Kuwait untuk pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darussalam Garut.

Untuk merealisasikan kerjasama tersebut pada tahun 1990 Pondok Pesantren Darussalam Garut mendapat bantuan perdana dari donatur Kuwait berupa pembangunan Masjid Jami Fityatu-l Huda dengan luas 14x14 meter yang diberikan

oleh Tn. Mahwaz Sulaiman As Said. Pembangunan Masjid tersebut diresmikan oleh Bupati Garut dengan disaksikan oleh Pendiri Pondok dan Camat Kec. Kersamanah.

Bermula dari bantuan tersebut pada tahun 1994 Pondok Pesantren Darussalam Garut mendapat bantuan selanjutnya untuk mendirikan Darul Aitam (Pondok Pesantren untuk Anak Yatim Piatu) dengan pembangunan 1 Buah Masjid dan 1 Buah Asrama yang diberinama Masjid Ar-Rahmah dan Asrama Ar-Rahmah bantuan ini diberikan oleh Tn Daud Al-Anshari dan istrinya Ny. Daud Al-Anshari.

Pada awal tahun 2000 Ust. Abdullah Baharmuz bertemu dengan Syeikh Ahmad Muhammad Yousuf Al-Haoly dari Kuwait untuk membahas penjajakan kerjasama antara Pondok Pesantren Darussalam Garut dengan pemerintah Kuwait . berawal dari pertemuan tersebut terjalinlah kerjasama dengan donatur Kuwait secara besar-besaran untuk membantu Pondok Pesantren Darussalam Garut dalam penyediaan sarana dan prasarana bantuan tersebut masih dalam bentuk bantuan individu, barulah pada tahun 2006 terjadilah MoU antara Pondok Pesantren Darussalam Garut dengan Pemerintah Kuwait setelah adanya pengakuan dari pemerintah Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut dengan pemberian nama Kampung Sosial YM. Syeikh Shabah Al-Ahmad As-Shabah.

Bantuan Perdana dari Pemerintah Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut berupa Aula Serbaguna yang diberi nama Aula Serbaguna Kampung Sosial YM. Syeikh Shobah Al-Ahmad As-Shobah (Emir Negara Kuwait) bantuan ini diberikan langsung oleh Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait pada bulan Mei 2014 / Rajab 1435 . Peresmian Aula tersebut dihadiri langsung oleh

Syeikh Rashid Mutlaq perwakilan kementerian wakaf Kuwait Duta Besar Kuwait untuk Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Adanya bantuan luar negeri dalam bidang Pendidikan dan Sosial dapat dilihat dari penelitian - penelitian dan jurnal terdahulu. Salah satunya sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti yaitu *" Bantuan Luar Negeri Kanada Ke Indonesia Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Bawah CIDA'S AID Effectiveness Action Plan 2009-2013"* Tahun 2014 oleh Eri Sugiarto dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan ini membahas mengenai pemaparan jelas action plan CIDA'S AID melalui bantuan luar negeri kanada kepada Indonesia dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, perbedaan dengan penelitian ini peneliti membahas tentang bantuan luar negeri Kanada kepadaa Indonesia sedangkan penelitian ini akan membahas bantuan luar negeri Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut.

Selain penelitian diatas terdapat pula sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti yaitu *" Kekuasaan Produktif Amerika Dan Budaya Demokrasi Dalam Program Bantuan Pendidikan USAID Untuk Indonesia"* Tahun 2008 oleh Andrew Wiguna Mantong dari Universitas Indonesia Depok. Dalam penulisan ini membahas mengenai upaya pelaksanaan demokrasi pemerintah amerika serikat dalam program bantuan Pendidikan melalui USAID (*United States Agency for International Development*) untuk Indonesia, persamaan dengan penelitian ini peneliti sama-sama membahas kerjasama internasional antara 2 negara di bidang Pendidikan yang berupa bantuan Pendidikan, perbedaan dengan penelitian ini peneliti membahas tentang kerjasama internasional bidang

pendidikan antara Amerika Serikat dengan Indonesia sedangkan penelitian ini akan membahas kerjasama internasional bidang Pendidikan dan sosial antara Kuwait dengan Indonesia.

Selain karya ilmiah berupa skripsi terdapat pula sebuah karya ilmiah berupa jurnal yang sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti yaitu*" Kebijakan Selektif Eritrea terhadap bantuan luar negeri"* Tahun 2016 oleh Tri Galih Saksono dalam Jurnal Analisis Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga. Dalam penulisan ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia, perbedaannya dengan penelitian ini ialah penulis membahas tentang hubungan antara pemerintah Kuwait dengan Indonesia melalui bantuan Pendidikan dan sosialnya tanpa membahas mengenai kebijakan pemerintah dikarenakan bantuan ini bersifat dana hibah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul : ***" Bantuan Luar Negeri Kuwait Kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut dalam bidang Pendidikan dan Sosial "***

Penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah pokok yang telah dipelajari di prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yaitu:

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

   Mata kuliah ini secara umum mengkaji tentang hubungan internasional di kawasan asia tenggara. Indonesia yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah ini,

termasuk beberapa kegiatan seperti perjanjian internasional, kerjasama internasional yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara di asia tenggara

2. Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Afrika

Mata kuliah ini secara umum mengkaji tentang hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Kuwait yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah menjadi salah satu bahasan dalam mata kuliah ini, termasuk beberapa kegiatan seperti perjanjian internasional, kerjasama internasional yang terjadi di Kawasan Timur Tengah dan Afrika

3. Diplomasi dan Negosiasi

Mata kuliah ini secara umum mengkaji tentang salah satu bentuk hubungan internasional yaitu tentang diplomasi dan negosiasi, diplomasi dan negosiasi menjadi bahasan pokok dalam ilmu hubungan internasional itu sendiri karena untuk menjalin suatu kerjasama akan selalu membutuhkan proses diplomasi dan juga negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepahaman

4. Ekonomi dan Politik Internasional

Mata kuliah ini secara umum mengkaji secara tentang fenomena fenomena terbaru dalam bidang ekonomi dan politik luar negeri, ekonomi dan politik menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan internasional dikarenakan dua hal tersebut akan selalu jadi bahan pembicaraan utama dalam forum hubungan internasional, selain itu dalam mata kuliah ekonomi dan politik luar negeri ini mebahas mengenai bantuan luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Bantuan Luar Negeri Kuwait untuk Pondok Pesantren Darussalam dalam bidang pendidikan dan sosial ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Mengapa Kuwait memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut ?
2. Bagaimana proses bantuan luar negeri Kuwait untuk Pondok Pesantren Darussalam Garut?
3. Bantuan Apa saja yang diberikan Kuwait untuk Pondok Pesantren Darussalam Garut?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dari proses pemberian bantuan luar negeri Kuwait untuk Pondok Pesantren Darussalam Garut ?

Bantuan luar negeri kuwait untuk Pondok Pesantren Darussalam Garut sebenarnya telah ada sejak tahun 1990 namun bantuan secara intensif baru terjadi dari tahun 2000, maka dari pada itu demi memudahkan penelitian, peneliti menentukan batasan masalah dalam penelitian ini dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2016

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana bantuan luar negeri Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut dalam bidang pendidikan dan sosial serta ingin mengetahui bagaimana proses bantuan tersebut terjadi dan apa saja bantuan yang diberikan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya bantuan luar negeri Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut
2. Untuk mengetahui proses bantuan luar negeri Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut
3. Untuk mengetahui apa saja bantuan yang diberikan Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam
4. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dari proses pemberian bantuan kepada Pondok Pesantren Darussalam

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan tentang ilmu hubungan internasional khususnya tentang proses Hubungan Internasional yang terjadi di Asia Tenggara, hubungan internasional di Timur Tengah dan Afrika, dan juga Diplomasi dan Negosiasi dalam hubungan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat bermanfaat di dalam pengaplikasiannya baik itu bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat luas sehingga dapat digunakan untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan bantuan luar negeri Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut

1. Bagi Peneliti

   Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih tentang proses bantuan luar negeri secara langsung yang terjadi antara pemerintah negara Kuwait dengan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya bantuan luar negeri dalam bidang pendidikan dan social

2. Bagi Universitas

   Dapat memberikan atau menambah perbendaharaan ilmu tentang kerjasama internasional bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UNIKOM khususnya umumnya untuk Universitas Komputer Indonesia

3. Bagi Mahasiswa

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kajian lanjutan tentang Hubungan Internasional yang terjadi di Asia Tenggara, hubungan internasional di Timur Tengah Dan Afrika, Hukum Internasional, dan juga Diplomasi dan Negosiasi dalam hubungan internasional khususnya bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional

4. Bagi Pondok Pesantren

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan lebih luas bagi pondok pesantren bahwasannya lembaga Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri untuk kemajuan dan keberlangsungan pondok pesantren agar dapat mencetak kader-kader penerus bangsa yang memiliki integritas tinggi dan akhlaq yang mulia.